



PARTISIPASI POLITIK ANAK TNI DALAM PEMILIHAN UMUM

PRESIDEN TAHUN 2019

(Studi Kasus Asrama Ex Brigif 5)

SKRIPSI

Untuk memperoleh gelar Sarjana Sosial (S.Sos)

Oleh:

Dhohan Wiranata

3312415067

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
JURUSAN POLITIK DAN KEWARGANEGARAAN

FAKULTAS ILMU SOSIAL

UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

2019

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi ini telah disetujui oleh Pembimbing untuk diajukan ke Sidang
Panitia Ujian Skripsi Fakultas Ilmu Sosial UNNES pada:

Hari : Selasa

Tanggal : 9 Juli 2019

Pembimbing Skripsi I



Martien Herna Susanti, S.Sos, M.Si

NIP. 197303312005012001

Mengetahui:

Ketua Jurusan Politik dan Kewarganegaraan



UNNES

Drs. Tijan, M.Si

UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

NIP. 196211201987021001

PENGESAHAN KELULUSAN

Skripsi ini telah dipertahankan di depan Sidang Panitia Ujian Skripsi
Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Semarang pada:

Hari : Selasa
Tanggal : 23 Juli 2019

Penguji I

Drs. Setinjid, M.Si.
NIP. 196006231989011001

Penguji II

Erisandi Arditama, S.I.P., M.A.
NIP. 198705012018031001

Penguji III

Martien Herna Susanti, S.Sos, M.Si
NIP. 197303312005012001

Mengetahui:

Dekan,



Dr. Moh. Salehatul Mustofa M.A.

NIP. 196308021988031001

PERNYATAAN

Saya menyatakan bahwa yang tertulis di dalam skripsi ini benar-benar hasil karya saya sendiri, bukan jiplakan dari karya tulis orang lain, baik sebagian atau seluruhnya. Pendapat atau temuan orang lain yang terdapat di dalam skripsi ini dikutip atau dirujuk berdasarkan kode etik ilmiah.

Semarang, 23 Juli 2019



Dhohan Wiranata

NIM. 3312415067



UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

Jadikan deritaku ini sebagai kesaksian bahwa kekuasaan seorang Presiden sekalipun ada batasnya. Karena kekuasaan yang langgeng hanya kekuasaan rakyat. Dan diatas segalanya adalah Kekuasaan Tuhan Yang Maha Esa (Ir. Soekarno)

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan kepada:

1. Orang tua saya, Alm. Bapak Surono dan Ibu Tuminah yang telah memberikan kasih sayang, semangat dan doa menyelesaikan skripsi.
2. Kakaku tercinta Andries Handi Saputra dan Devi Tataning Pratiwi yang telah memberikan motivasi dan saran dalam menyelesaikan skripsi.
3. Anggun Permata Putri terima kasih telah menjadi teman setia yang mendengarkan keluh kesah, memberi semangat, dukungan serta doa.
4. Teman-teman ku yang selalu menanyakan skripsiku sehingga memotivasi diriku untuk segera menyelesaikannya.

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

PRAKATA

Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan hidayah dan rahmat-Nya, sehingga penyusunan skripsi yang berjudul “Partisipasi Politik Anak TNI Dalam Pemilihan Umum Presiden Tahun 2019 (Studi Khusus Asrama Ex Brigif 5) dapat terselesaikan dengan baik.

Penyusunan skripsi ini dilaksanakan sebagai salah satu syarat dalam menyelesaikan Studi Strata I pada Program Studi Ilmu Politik, Jurusan Politik dan Kewarganegaraan, Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang. Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada para pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini:

1. Prof. Dr. Fatkhur Rohman, M.Hum selaku Rektor Universitas Negeri Semarang.
2. Dr. Mohammad Solehatul Mustofa, MA, Dekan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang yang telah memberikan izin penelitian.
3. Drs. Tijan, M.Si, Ketua Jurusan PKn Universitas Negeri Semarang yang telah memberikan kemudahan dan kelancaran administrasi dalam penyusunan skripsi.
4. Martien Herna Susanti, S.Sos, M.Si, Dosen Pembimbing, yang dengan sabar, tulus dan ikhlas memberikan bimbingan dan ilmunya yang sangat berharga.
5. Drs. Setiajid, M.Si. Dosen penguji I yang telah menguji, memberikan saran dan pengarahan dengan penuh kesabaran sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

6. Erisandi Arditama, S.I.P, M.A. Dosen penguji II yang telah menguji, memberikan saran dan pengarahan dengan penuh kesabaran sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
7. Sri Rahayuningsih, S.Sos, MM, Kepala Kelurahan Serondol Kulon yang telah memberikan izin untuk melakukan penelitian.
8. Subadri , Ketua Rw 03 (Asrama Ex Brigif 5) yang telah membantu selama kegiatan penelitian.
9. Anak-anak TNI di Asrama Ex Brigif 5 atas partisipasinya dalam penelitian ini.
10. Alm. Bapak, Ibu dan Kakakku yang telah memberikan doa dan dukungan serta menjadi alasan saya tetap berjuang.
11. Teman-teman Ilmu Politik angkatan 2015 atas kebersamaannya selama di bangku kuliah.
12. Semua pihak yang telah membantu penyusunan skripsi ini yang tidak dapatku sebutkan satu persatu.

Akhir kata penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan perkembangan pendidikan selanjutnya.



Semarang, 23 Juli 2019

Penyusun

SARI

Wiranata, Dhohan. 2019. *Partisipasi Politik Anak TNI Dalam Pemilihan Umum Presiden Tahun 2019 (Studi Kasus Asrama Ex Brigif 5)*. Skripsi. Jurusan Politik dan Kewarganegaraan. Fakultas Ilmu Sosial. Universitas Negeri Semarang. Pembimbing Martien Herna Susanti, S.Sos, M.Si. 151 halaman.

Kata Kunci: Partisipasi Politik, Anak TNI, Pemilihan Umum Presiden

Partisipasi politik merupakan salah satu indikator dari negara yang menganut sistem demokrasi. Berdasarkan UU no 34 Tahun 2004 tentang TNI dilarang ikut dalam politik praktis, akan tetapi hal ini tidak berlaku bagi keluarga TNI dimana mereka berhak ikut dalam urusan politik. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui partisipasi politik anak TNI dan faktor yang mempengaruhi partisipasi politik anak TNI di Asrama Ex Brigif 5 Kota Semarang dalam pemilihan Presiden tahun 2019.

Penelitian ini dilakukan di Asrama Ex Brigif 5 menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui, wawancara, dan dokumentasi. Uji validitas data dilakukan dengan triangulasi, dan teknik analisis data pada penelitian ini dilakukan mulai dari pengumpulan data, reduksi data, penyajian data hingga penarikan kesimpulan atau verifikasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa bentuk partisipasi politik anak TNI dalam pemilihan umum Presiden tahun 2019 adalah menggunakan hak pilih, diskusi politik, dan ikut dalam sosialisasi yang dilakukan KPPS. Dari ketiga bentuk partisipasi politik anak TNI tersebut terdapat bentuk partisipasi politik yang unik yaitu diskusi politik, karena diskusi politik yang mereka lakukan hanya kepada teman sepermainan bukan bersama orang tua mereka dikarenakan status orang tua mereka sebagai TNI yang menjunjung netralitas dalam segala urusan politik. selanjutnya terdapat faktor yang mendorong partisipasi politik anak TNI dalam pemilihan umum Presiden tahun 2019 adalah adanya rangsangan, karakteristik pribadi seseorang, sosial ekonomi, kesadaran politik, informasi dari media massa dan latar belakang calon kandidat. Faktor pendorong di sini adalah faktor yang mempengaruhi pilihan politik mereka. Sedangkan faktor penghambat partisipasi politik anak TNI adalah kesibukan sebagai pelajar, kesibukan dalam bekerja, dan anggapan partisipasi politik merupakan kesia-siaan, faktor penghambat di sini adalah faktor yang menghambat mereka untuk ikut dalam partisipasi politik dalam bentuk diskusi politik secara formal, hal ini karena mereka merasakan tidak adanya waktu dan rasa sia-sia bila mengikuti diskusi politik secara formal yang dilakukan oleh pemerintah, parpol, dan media massa.

Parpol, Ormas, dan Media massa dapat meningkatkan partisipasi politik anak TNI dengan diadakannya kegiatan sosialisasi politik, sehingga anak TNI akan lebih tahu akan hak, kewajiban, dan tanggung jawab sebagai masyarakat yang memiliki peran besar dalam memilih pemimpin baik di masa depan. KPUD Kota Semarang untuk lebih aktif dan kreatif dalam mengadakan sosialisasi politik atau diskusi politik untuk kalangan remaja pada setiap Kelurahan.

ABSTRACT

Wiranata, Dhohan. 2019. Political participation of TNI in the presidential election year 2019 (case study of Ex-Brigif dormitory 5). Skripsi. Department of Politics and Citizenship. Faculty of Social Sciences. Universitas Negeri Semarang. Supervisor Martien Herna Susanti, S.Sos, M.Si. 151 pags.

Keywords: Political participation, Presidential elections, TNI Child

Political participation is one of the indicators of a country that adheres to democratic systems. Based on LAW No. 34 year 2004 Army is banned from participating in practical politics, but this does not apply to the TNI family where they have the right to participate in political affairs. The purpose of this research is to determine the political participation of TNI children and the factors that influence the political participation of TNI children in the dormitory Ex Brigif 5 City of Semarang in the presidential election in 2019.

The research was conducted at the hostel Ex Brigif 5 using a qualitative approach with data collection techniques through, interviews, and documentation. Data validity tests are conducted by triangulation, and the data analysis techniques in this research are conducted from data collection, data reduction, data presentation to conclusion withdrawal or verification.

The results showed that the form of political participation of the TNI in the presidential election of 2019 was to use suffrage, political discussion, and participated in the socialization conducted by KPPS. Of the three forms of political participation of the TNI, there is a unique form of political participation that is political discussion, because the political discussion that they do to the playmates not with their parents due to the status of parents They are the TNI that uphold neutrality in all political matters. Further, there are factors that promote the political participation of TNI children in the presidential elections of 2019 is the stimulus, personal characteristics of a person, socio-economic, political awareness, information from the mass media and background Candidates. The driving factor here is the factor that affects their political choices. Whereas the inhibiting factor of TNI children's political participation is student activity, busy work, and the assumption that political participation is futile, the inhibiting factors here are factors that prevent them from participating in political participation in the form of formal political discussion, this is because they feel the absence of time and a sense of futility when formally taking part in political discussions conducted by the government, political parties, and the mass media.

Parpol, Ormas, and Media can increase the political participation of the armed forces with political socialization activities, so that the TNI will know more about the rights, obligations, and responsibilities as a society that has a big role in choosing Good leaders in the future. KPUD Semarang to be more active and creative in conducting political socialization or political discussion for teenagers in each village.

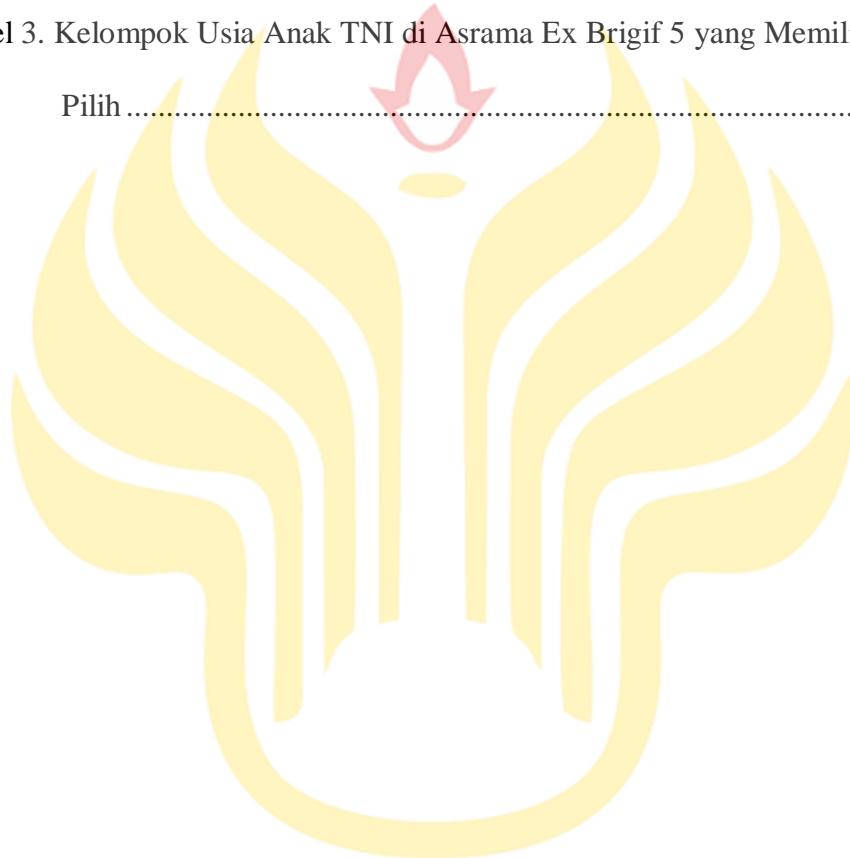
DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN KELULUSAN	iii
PERNYATAAN	iv
MOTO DAN PERSEMBAHAN	v
PRAKATA	vi
SARI	viii
ABSTRACT	ix
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR BAGAN	xiv
DAFTAR GAMBAR	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xvi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan Penelitian	11
D. Manfaat Penelitian	11
E. Batasan Istilah	12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA BERFIKIR	
A. Pengertian Partisipasi Politik	15
B. Bentuk-bentuk Partisipasi Politik	17
C. Faktor yang Mempengaruhi Partisipasi Politik	23
D. Pengertian Sosialisasi Politik	31
E. Agen Sosialisasi Politik	33
F. Pemilihan Umum Presiden	39
G. TNI	41
H. Kerangka Berfikir	46
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Latar Penelitian	47
B. Lokasi Penelitian	48
C. Fokus Penelitian	49
D. Sumber Data	50
E. Alat Dan Metode Pengumpulan Data	51
F. Uji Validitas Data	53
G. Teknik Analisis Data	54
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Hasil Penelitian	58
1. Gambaran Umum Daerah Penelitian	58
a. Letak Geografis dan Luas Wilayah	58

b.	Jumlah Penduduk	58
c.	Kondisi Masyarakat	59
d.	Jumlah Anak TNI yang Memiliki Hak Pilih	60
2.	Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara	61
3.	Partisipasi Politik Anak TNI Dalam Pemilihan Umum Presiden Tahun 2019 di Asrama Ex Brigif 5 Kelurahan Serondol Kulon Kecamatan Banyumanik Kota Semarang	62
a.	Bentuk Partisipasi Politik Anak TNI	62
4.	Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Partisipasi Politik Anak TNI Dalam Pemilihan Umum Presiden Tahun 2019	69
a.	Faktor Partisipasi Politik Anak TNI	69
1)	Faktor Pendorong Partisipasi Politik Anak TNI Dalam Pemilihan Umum Presiden Tahun 2019	70
2)	Faktor Penghambat Partisipasi Politik Anak TNI Dalam Pemilihan Umum Presiden Tahun 2019	77
B.	Pembahasan	79
BAB V PENUTUP		
A.	Kesimpulan	93
B.	Saran	94
DAFTAR PUSTAKA		
LAMPIRAN		

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Bentuk-bentuk Partisipasi Politik Menurut Mas'ood dan MacAndrews.....	22
Tabel 2. Kelompok Umur di Asrama Ex Brigif 5	59
Tabel 3. Kelompok Usia Anak TNI di Asrama Ex Brigif 5 yang Memiliki Hak Pilih	60



UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

DAFTAR BAGAN

Bagan 1. Kerangka Berpikir	46
Bagan 2. Teknik Analisis Data	57



UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

DAFTAR GAMBAR

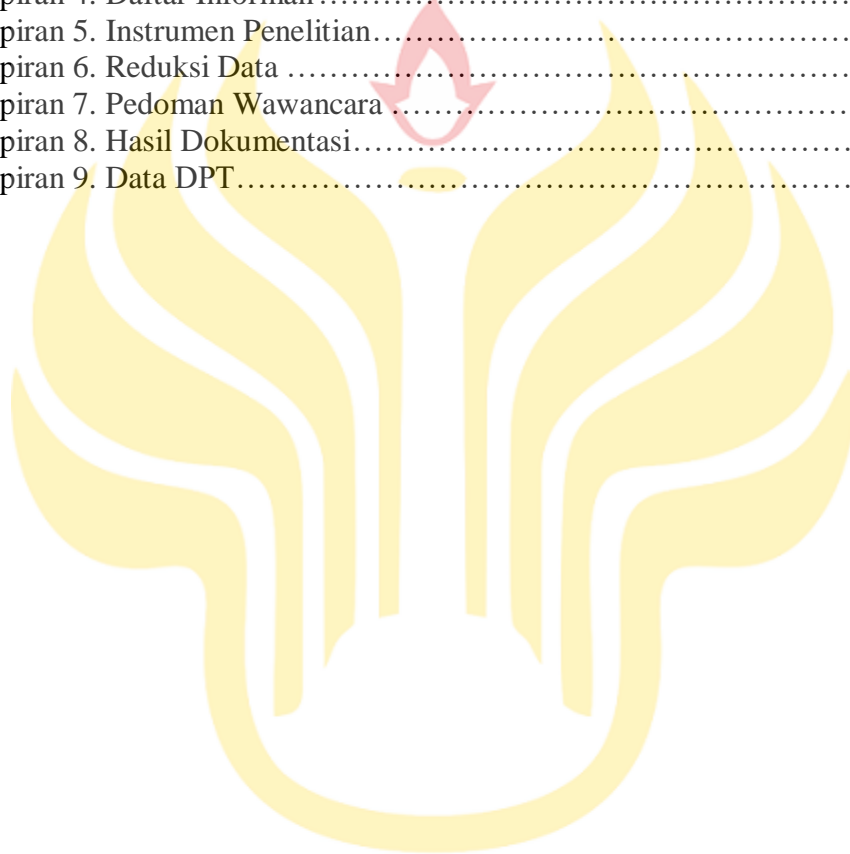
Gambar 1. Bentuk Partisipasi Politik Menurut Rush dan Philip Althoff	21
Gambar 2. Anak TNI Menggunakan Hak Pilih	80



UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang	99
Lampiran 2. Surat Permohonan Ijin Penelitian	100
Lampiran 3. Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian	101
Lampiran 4. Daftar Informan	102
Lampiran 5. Instrumen Penelitian.....	105
Lampiran 6. Reduksi Data	113
Lampiran 7. Pedoman Wawancara	130
Lampiran 8. Hasil Dokumentasi.....	139
Lampiran 9. Data DPT.....	142



UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Partisipasi politik merupakan salah satu indikator yang mencerminkan dimana dalam sebuah negara tersebut sudah tertanam tatanan nilai demokrasi, partisipasi politik ini juga menandakan telah terjadinya perubahan di dalam sebuah negara yang dapat dikatakan kuno menjadi negara yang lebih baik dalam hal ini yang dimaksud negara kuno adalah negara yang mana dalam kehidupan warga masyarakatnya sangat kecil untuk dapat dalam mempengaruhi suatu kebijakan yang diambil oleh seorang pemimpin yang mana dalam posisi pemimpin itu diduduki oleh sekelompok kecil elite yang sangat berkuasa. Sehingga dari minimnya hak yang dimiliki warga negara maka seringkali hak warga negara tersebut dikesampingkan dalam perumusan sebuah kebijakan yang akan dibuat, sehingga dari adanya fenomena tersebut mengakibatkan kurangnya partisipasi politik di dalam sebuah negara. Sedangkan negara modern yang dimaksud di sini adalah negara mengalami perubahan menuju arah yang lebih baik, modernisasi di dalam negara tersebut bisa menyangkut segala bidang seperti modernisasi hukum, modernisasi ideologi, dan modernisasi politik yang ada didalamnya.

Partisipasi politik yang merupakan wujud dari negara yang demokratis dimana terdapat sebuah kekuasaan tertinggi yaitu berada

pada kedaulatan rakyat yang sah di mata hukum, partisipasi politik ini diimplementasikan dalam sebuah pesta rakyat demokratis atau sering disebut Pemilihan Umum (Pemilu) yang diadakan dalam waktu yang tetap. Dari Pemilihan Umum tersebut akan terlihat partisipasi dari sebuah masyarakat, dimana bila partisipasi politik menunjukkan kualitas yang bagus hal ini menandakan bahwa keterlibatan warga masyarakat dapat dikatakan baik dalam kegiatan demokratis dan apabila partisipasi politik yang buruk hal ini menandakan kurangnya perhatian dan niat warga negara dalam kegiatan demokratis, buruknya partisipasi politik tersebut ditandai dengan tidak digunakannya hak pilihnya dalam pemilu atau sering disebut Golongan Putih (Golput) yang sebenarnya golput ini merupakan sebuah catatan tertentu dalam masyarakat yang artinya adanya ketidakpahaman yang terbaik untuk masyarakat tersebut.

Melihat partisipasi politik dalam pemilu di Indonesia pada era Presiden Soeharto dikatakan berada pada titik kualitas terbaik karena adanya keterlibatan ABRI dalam politik di Indonesia, hal ini dikarenakan adanya Doktrin Dwifungsi ABRI. Karena pada mulanya dalam UU No. 20/1982 tentang Pertahanan dan Keamanan (Hankam) dimana ABRI baru dinyatakan sebagai kekuatan sosial. Akan tetapi dengan adanya UU No. 2/1988 tentang ABRI yang dinyatakan sebagai kekuatan sosial politik juga sebagai kekuatan Pertahanan dan Keamanan (Hankam). Dengan adanya legalitas berdasarkan hukum tersebut ABRI secara sah ikut dalam praktik politik di Indonesia dan

secara langsung menjadi kekuatan yang sangat penting dalam waktu tiga puluh dua tahun Pemerintahan Presiden Soeharto (Samego, 2000:3).

Seperti yang dikemukakan Harold Crouch (dalam Firdaus, 2018:9) menyatakan “konsep dwifungsi ABRI bukanlah suatu doktrin mati yang ditetapkan untuk selama-lamanya, tetapi doktrin yang hidup, yaitu suatu doktrin dinamis yang dapat berubah sesuai perkembangan zaman”.

Firdaus (2018:9) menyatakan “hal tersebut senada dengan pandangan dari beberapa pimpinan dan mantan pimpinan ABRI, yang menyatakan bahwa Dwifungsi ABRI akan terus dilaksanakan sepanjang masa, namun peran sosial politiknya harus disesuaikan dengan perubahan sistem demokrasi yang ada dan sesuai dengan keinginan rakyat mengenai demokrasi”.

Firdaus (2018:10) menyatakan “dominasi militer dalam birokrasi adalah salah satu implikasi bentuk pemberlakuan kebijakan dwifungsi ABRI yang berdampak pada kehidupan sosial politik di Indonesia, khususnya terhadap tumbuhnya demokrasi yang sangat diharapkan oleh seluruh rakyat Indonesia yang sejak awal kemerdekaan memiliki cita-cita terbentuknya negara demokrasi yang berdasarkan kepada UUD 1945 dan Pancasila”.

Dari adanya Doktrin Dwifungsi ABRI yang dibentuk Pemerintahan Orde Baru ini menjadikan adanya sebuah pemikiran

dimana Dwifungsi ABRI hanyalah sebagai pengalih perhatian yang mana ABRI bukan sebagai alat untuk menjaga kekuatan stabilator dan dinamisator di kekuasaan partai politik yang kebanyakan hanya mementingkan kekuatan partai, melainkan di sini ABRI adalah sebagai kekuatan untuk menjaga kekuasaan (Golongan Karya) bukan sebagai penjaga kedaulatan negara. Awetnya dukungan ABRI terhadap masa Orde Baru ini disebabkan karena beberapa hal.

Pertama, dibuatnya peraturan khusus UU tentang susunan dan kedudukan anggota DPR/MPR dari kalangan TNI aktif melalui jalur pengangkatan, hal ini dilakukan untuk menyeimbangi kekuatan partai politik serta mencegah partai politik yang dapat mengancam jalannya pemerintahan. Sehingga dari adanya jalur pengangkatan TNI di kursi DPR/MPR ini diharapkan mampu menjadi fondasi serta pagar penghalang untuk para elit politik yang ingin melakukan perubahan dasar UUD 1945. Kedua, diberikannya jabatan-jabatan penting di pusat maupun daerah, bahkan para perwira TNI dijadikan duta besar di beberapa negara besar seperti Australia, Amerika Serikat, Jerman Barat, Jepang, Perancis, Inggris, dan Singapura. Ketiga, di pemerintahan Presiden Soeharto keluarga TNI diberi kemudahan dalam menjalankan bisnis perusahaan hutan hingga pelayanan angkutan udara, sehingga banyak bisnis dengan embel-embel nama TNI. Dengan begitu kekuatan TNI akan lebih mengikat kencang ke

kekuasaan Soeharto saat itu karena banyaknya perlakuan istimewa yang didapatkan (Samego, 2000:3-5).

Maliki (2018:250) menyebutkan bahwa “selama masa Orde Baru negara sangat kuat. Tidak ada perubahan yang tidak dimulai dari negara, masyarakat tidak memiliki ruang partisipasi politik, Masyarakat dimobilisasi oleh negara. Partisipasi bukan bermakna turut serta merencanakan, melaksanakan, dan mengawasi kebijakan pembangunan. Partisipasi berubah makna menjadi turut serta memberi sumbangan dari proyek pemerintah yang biayanya kurang”.

Sempitnya ruang partisipasi politik masyarakat selama masa Orde Baru adalah dibatasinya kebebasan pers dan kebebasan berpendapat, akan tetapi partisipasi politik masyarakat dalam menggunakan hak pilihnya sangat tinggi karena ada unsur mobilisasi didalamnya.

Berlanjut pada era Reformasi dimana peran ABRI dalam kehidupan sosial politiknya mengalami perubahan yang dikarenakan munculnya penolakan dari beberapa unsur yang ada dalam masyarakat dengan begitu pada masa Reformasi ini terdapat pemisahan fungsi ABRI yang dipecah menjadi Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri). Dimana kedua lembaga tersebut memiliki fungsi yang berbeda yang mana TNI memiliki tugas untuk tetap menjaga keamanan NKRI dari serangan negara lain

sedangkan Polri menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat yang tertib hukum (Sunarto, 2016:82-83).

Pemisahan antara TNI dengan Polri tersebut berjalan hingga saat ini setelah disahkannya UU Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia, UU Nomor 3 tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, dan UU Nomor 34 tahun 2004.

Fungsi TNI yang mana telah di atur dalam UU No 34 tahun 2004 pasal 6 ayat 1 tentang Tentara Nasional Indonesia disebutkan bahwa TNI sebagai alat pertahanan negara berfungsi sebagai, 1) penangkal terhadap setiap bentuk ancaman militer dan ancaman bersenjata dari luar dan dalam negeri terhadap kedaulatan, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa, 2) penindak terhadap setiap bentuk ancaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dan 3) pemulih terhadap kondisi keamanan negara yang terganggu akibat kekacauan keamanan.

Kemudian untuk tugas TNI yang diatur dalam UU No 34 tahun 2004 pasal 7 ayat 1 tentang Tentara Nasional Indonesia adalah Tugas pokok TNI adalah menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara.

Dalam UU No 34 tahun 2004 pasal 39 tentang Tentara Nasional Indonesia disebutkan bahwa prajurit dilarang terlibat dalam 1) kegiatan menjadi anggota partai politik, 2) kegiatan politik praktis 3) kegiatan bisnis dan 4) kegiatan untuk dipilih menjadi anggota legislatif dalam pemilihan umum dan jabatan politis lainnya.

Dewasa ini yang menjadi kebingungan di dalam era Reformasi ini adalah penggunaan hak pilih yang dimiliki oleh kalangan TNI, dimana TNI dalam UU No 34 tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia dilarang ikut dalam ranah politik praktis demi dapat berdiri di segala golongan akan tetapi dalam konteks HAM TNI merupakan WNI yang juga memiliki hak dalam menggunakan hak pilihnya.

Hal yang menjadi pertimbangan di sini jika TNI tetap menggunakan hak pilihnya dalam pemilihan umum adalah karena adanya garis komando atau hirarkhi komando yang berdampak pada ketaatan prajurit terhadap atasan, sehingga dukungan politik para Jenderal akan sangat mempengaruhi dukungan politik prajuritnya. Masalahnya di sini dukungan politik para Jenderal tidak bisa berjalan pada satu jalur, katakanlah bila ada dua Panglima purnawirawan yang bertarung di pemilihan Presiden tentu para Jenderal tak akan mendukung kedua calon tersebut yang mana hal itu dapat menimbulkan perpecahan internal didalam tubuh TNI. Dari adanya hierarki komando ini juga yang membedakan kualitas serta wibawa elit

politik yang datang dari kalangan TNI dengan elit politik yang datang dari kalangan sipil (Sunarto, 2016:83).

Dari adanya sejarah yang panjang mengenai keterlibatan TNI dalam urusan politik yang dimulai dari era Orde Lama, Orde Baru dan Reformasi hingga sekarang, muncullah sebuah komitmen dalam TNI tersebut yang menyatakan bahwa untuk tidak menggunakan hak pilihnya dalam pemilihan umum guna untuk menjalankan tugas dari TNI yang mampu berdiri disegala golongan juga sebagai menjaga keutuhan dalam tubuh TNI itu sendiri (Sunarto, 2016:83).

Sehingga dari adanya komitmen TNI untuk tidak menggunakan hak pilihnya dalam pemilihan umum tersebut hal ini tidak berlaku kepada keluarga dari TNI. Penelitian ini menarik karena anak TNI dapat menggunakan hak pilihnya karena status mereka bukan sebagai TNI melainkan hanya sebagai Warga Negara Indonesia biasa. Sehingga penelitian ini penting untuk dikaji guna mengetahui partisipasi politik dari keluarga TNI terutama pada anak-anak mereka yang tinggal di lingkungan Asrama TNI.

Asrama TNI merupakan salah satu tempat dilarang untuk dilakukan kampanye maupun pemasangan alat peraga kampanye (APK) karena merupakan bangunan dan fasilitas milik pemerintah, yang telah disebutkan dalam UU No 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Penelitian tentang partisipasi politik pernah dilakukan oleh Aulia Sholichah Iman Nurchotimah yang berjudul “Partisipasi Politik Pemilih Pemula Di Desa Karang Sari Kecamatan Kebasen Kabupaten Banyumas Pada Pemilihan Presiden 2014”. Berdasarkan uraian penelitian dan pembahasan tersebut dengan fokus bentuk partisipasi politik pemilih pemula dan faktor yang mempengaruhi partisipasi politik pemilih pemula di Desa Karang Sari Kecamatan Kebasen Kabupaten Banyumas pada pemilihan Presiden 2014.

Larangan APK di Asrama TNI dinyatakan oleh Subadri yang menyatakan. “tentu pasti semua anggota partai politik tahu di sini kan asrama TNI ya jadi tidak boleh ada kegiatan kampanye politik dan APK, bila ada yang nekat pasang APK nanti saya copoti”.

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan memang benar bahwa di Asrama Ex Brigif 5 tidak terdapat satupun APK yang terpasang di lingkungan Asrama Ex Brigif 5, pemasangan APK baru terlihat sekitar 50 meter sebelum gapura masuk di Asrama Ex Brigif 5.

Asrama Ex Brigif 5 merupakan asrama TNI yang memiliki penduduk sebanyak 223 kepala keluarga, terdiri dari kalangan TNI aktif maupun TNI yang sudah Purnawirawan dengan pangkat tinggi. Sehingga dari adanya kelompok TNI Purnawirawan tersebut akan lebih menarik untuk melakukan penelitian di Asrama Ex Brigif 5 tersebut karena pada dasarnya terdapat TNI aktif yang dilarang menggunakan hak pilihnya berdasarkan UU 34 tahun 2004, berubah

menjadi boleh menggunakan hak pilihnya dikarenakan status TNI Purnawirawan. Selain itu dari adanya peraturan KPU larangan memasang alat peraga kampanye di lokasi ini menambahkan keunikan karena APK yang berfungsi untuk mempengaruhi hak pilih akan tetapi di lokasi ini hal tersebut tidak berlaku, sehingga hal tersebut dimungkinkan dapat berdampak pada kurangnya informasi keluarga TNI terhadap visi misi calon Presiden. Kemudian dari jumlah penduduk yang besar di lokasi ini diharapkan terdapat banyaknya jumlah anak TNI aktif yang telah memiliki hak pilih ketika Pemilihan Umum Presiden tahun 2019.

Berdasarkan identifikasi dan latar belakang permasalahan di atas maka dalam penelitian ini akan penulis akan mengangkat judul tentang “PARTISIPASI POLITIK ANAK TNI DALAM PEMILIHAN UMUM PRESIDEN TAHUN 2019 (STUDI KASUS ASRAMA EX BRIGIF 5)”

B. Rumusan Masalah

Dari adanya latar belakang di atas maka muncullah pertanyaan sebagai berikut.

1. Bagaimana partisipasi politik anak TNI di Asrama Ex Brigif 5 Kota Semarang dalam pemilihan Presiden tahun 2019?
2. Apa saja faktor yang mempengaruhi partisipasi politik anak TNI di Asrama Ex Brigif 5 Kota Semarang dalam pemilihan Presiden tahun 2019?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penulisan Skripsi ini adalah sebagai berikut.

1. Mengetahui partisipasi politik anak TNI di Asrama Ex Brigif 5 Kota Semarang dalam pemilihan Presiden tahun 2019.
2. Mengetahui faktor yang mempengaruhi partisipasi politik anak TNI di Asrama Ex Brigif 5 Kota Semarang dalam pemilihan Presiden tahun 2019.

D. Manfaat Penelitian

Melalui penelitian yang berjudul Partisipasi Politik Anak TNI ini diharapkan memperoleh manfaat sebagai berikut.

1. Manfaat Teoritis

a. Bagi peneliti

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan pengetahuan dan informasi dengan apa yang ada di lapangan terutama pada partisipasi politik anak TNI di Asrama Ex Brigif 5.

b. Bagi Akademisi

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat referensi bagi dunia akademisi dalam bidang politik terutama pada konsep partisipasi politik khususnya anak TNI.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Anak TNI

Hasil dari penelitian ini diharapkan mampu memberikan hal baru terkait realitas sosial terhadap anak TNI di Asrama Ex Brigif 5, sehingga dengan begitu anak TNI dapat menyerap hal-hal yang baik mengenai partisipasi politik untuk kedepannya.

b. Bagi Akademisi

Hasil dari penelitian ini diharapkan mampu menjadi pijakan literasi bagi akademisi untuk lebih memperluas kajian tentang partisipasi politik yang ada di dunia. Serta menambah kemampuan untuk menganalisis bentuk partisipasi partisipasi politik.

E. Batasan Istilah

1. Partisipasi Politik

Partisipasi politik adalah kegiatan yang dilakukan seseorang atau orang dalam kehidupan politik mereka, dilakukan dengan beberapa kegiatan seperti menggunakan hak pilih untuk memilih pemimpin negara, mempengaruhi kebijakan pemerintah dengan berbagai cara seperti lobbying dengan lembaga eksekutif maupun legislatif (Budiardjo, 2013:367).

Dalam penelitian ini partisipasi politik adalah partisipasi politik anak TNI Aktif dalam menggunakan hak pilih, diskusi politik, dan ikut sosialisasi yang dilaksanakan oleh KPPS dalam pemilihan Presiden tahun 2019.

2. Anak TNI Aktif

Anak berdasarkan Undang-Undang No 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak yaitu seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin (Supeno. 2010:41).

Menurut UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 1 angka 1 “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.” Pasal 330 ayat (1) KUHperdata “Seorang belum dapat dikatakan dewasa jika orang tersebut umurnya belum genap 21 tahun, kecuali seseorang tersebut telah menikah sebelum umur 21 tahun“<http://dunkdaknyonk.blogspot.com/2011/03/pengertian-anak-menurut-beberapa-uu.html> (diakses pada 8 Mei 2019).

Dari banyaknya batasan mengenai umur anak maka dapat ditarik kesimpulan bahwa penetapan batas umur pada anak adalah relatif pada hal yang dituju, seperti dalam hukum tata negara dimana penggunaan hak pilih anak dalam pemilihan umum yaitu anak harus berumur 17 tahun dan memiliki KTP.

Anak TNI adalah anak yang berasal dari keluarga TNI yang sah dimata hukum, dalam penelitian ini Anak TNI yang dimaksud adalah anak TNI aktif yang tinggal dalam lingkungan Asrama Ex Brigif 5 yang telah berumur 17 tahun atau telah memiliki KTP dan telah dapat menggunakan hak pilihnya dalam pemilihan Presiden

tahun 2019. Di Asrama Ex Brigif 5 terdapat 105 TNI Aktif dan 53 TNI Purnawirawan.

3. Pemilihan Umum Presiden

Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (dalam Undang-undang No. 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum).

Dalam penelitian ini yang dimaksud dengan pemilihan Presiden adalah pemilihan Presiden tahun 2019 yang dilakukan secara langsung oleh penduduk di Asrama Ex Brigif 5 yang telah sah dan memiliki hak pilih di daerah administratif.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA BERPIKIR

A. Pengertian Partisipasi Politik

Mengawali tinjauan pustaka teorisasi tentang partisipasi politik menjadi pembahasan yang pertama, Suryadi (2007:128) menjelaskan “konsep partisipasi politik menjadi penting dan urgen pada masa demokrasi sekarang. Partisipasi politik dianggap sebagai prasyarat dari bangunan atau berkembangnya demokrasi”.

Sherman dan Kolker (dalam Suryadi, 2007:128) menyebutkan bahwa “partisipasi politik merupakan jalan bagi massa untuk mempengaruhi atau mengontrol pemerintah. Sehingga dalam Proses mempengaruhi dan mengontrol pemerintah itu, dapat dalam berupa kelembagaan atau non kelembagaan”.

Peter (dalam Surbakti, 2010:179-180) menyebutkan “partisipasi politik merupakan salah satu aspek penting demokrasi. Asumsi yang mendasari demokrasi (dan partisipasi) adalah orang yang paling tahu tentang apa yang baik bagi dirinya adalah orang itu sendiri”.

Herbert McClosky berpendapat (dalam Budiardjo, 2013:367) mengatakan bahwa “partisipasi politik adalah kegiatan-kegiatan sukarela dari warga masyarakat melalui mana mereka mengambil bagian dalam proses pemilihan penguasa, dan secara langsung atau tidak langsung, dalam proses pembentukan kebijakan umum (*The term*

political participation will refer to those voluntary activities by which members of a society share in the selection of rulers and directly or indirectly in the formation of public policy”).

Dalam melakukan kajian partisipasi politik dinegara berkembang Huntington dan Nelson (dalam Handoyo, 2000:206) mengartikan “partisipasi politik sebagai kegiatan warga negara biasa (*private citizen*) yang bertujuan mempengaruhi pengambilan keputusan oleh pemerintah”.

Partisipasi politik merupakan hak seluruh warga negara termasuk anggota TNI yang sudah purnawirawan akan tetapi hal ini tidak berlaku bagi anggota TNI yang masih aktif dimana mereka harus tetap menjaga netralitas mereka dalam segala urusan politik.

Huntington (dalam Sastroatmodjo, 1995:70) “mengatakan di negara-negara berkembang cenderung partisipasi digerakkan secara meluas dan diarahkan untuk kepentingan pembangunan. Partisipasi bahkan sulit dibedakan dari unsur mobilisasi. Apabila dilakukan oleh pelakunya sendiri, partisipasi politik dinamakan partisipasi otonom, sedangkan jika yang menggerakkan orang lain disebut partisipasi yang dimobilisasi”.

Di beberapa negara terdapat orang yang memberikan suara atau berdemo guna mempengaruhi kebijakan pemerintah, tetapi kegiatan yang dilakukan mereka seringkali tidaklah muncul dari hati nurani pribadi yang ingin mempengaruhi kebijakan pemerintah melainkan

adanya imbalan yang diberikan untuk melancarkan aksi. Weine mengatakan bahwa partisipasi politik yang muncul bukan karena ego mereka sendiri maka hal tersebut tidak dapat dikatakan sebagai partisipasi politik (dalam Sastroatmodjo, 1995:71).

Banyak masyarakat yang seringkali aktif dalam mempengaruhi kebijakan pemerintah melalui berbagai kegiatan, akan tetapi sering kali partisipasi politik mereka tidak murni muncul secara mandiri melainkan dipengaruhi (dimobilisasi) oleh sebuah partai politik atau kelompok.

Pengertian dari partisipasi politik untuk lebih singkat, padat, dan jelas akan di sampaikan oleh Surbakti (dalam Handoyo, 2000:205-206) “partisipasi politik adalah keikutsertaan warga negara biasa dalam menentukan keputusan yang menyangkut atau mempengaruhi hidupnya”.

Pengertian partisipasi politik juga disampaikan oleh Michael Rush dan Philip Althoff (dalam Maran, 2007:147) yang menyatakan bahwa “partisipasi politik dianggap sebagai akibat dari sosialisasi politik. Namun kiranya perlu juga dicatat bahwa partisipasi politik pun berpengaruh terhadap sosialisasi politik. Tanpa partisipasi politik, sosialisasi politik tak dapat berjalan”.

B. Bentuk Partisipasi Politik

Ada banyak sekali bentuk dari partisipasi politik, akan tetapi pemahaman yang paling dasar di dalam masyarakat dalam bentuk

partisipasi politik adalah penggunaan hak suara mereka dalam pemilihan umum untuk memilih pemimpin negara seperti lembaga eksekutif dan legislatif atau memilih pemimpin lainnya. Padahal menggunakan hak suara dalam pemilu adalah bentuk partisipasi politik yang paling sederhana dan kecil, masih ada banyak bentuk partisipasi politik yang kapasitasnya lebih tinggi, partisipasi adalah sebuah kegiatan yang mana juga dapat dilihat dari berbagai sisi seperti partisipasi aktif dan partisipasi pasif.

Sastroatmodjo (1995:74) mengartikan partisipasi aktif dan partisipasi pasif adalah sebagai berikut:

Partisipasi aktif mencakupi kegiatan warga negara mengajukan usul mengenai suatu kebijakan umum, mengajukan alternatif kebijakan umum yang berbeda dengan kebijakan pemerintah, mengajukan kritik dan saran perbaikan untuk meluruskan kebijakan, membayar pajak, dan ikut serta dalam kegiatan pemilihan pimpinan pemerintahan. Di pihak lain partisipasi pasif, antara lain, berupa kegiatan mentaati peraturan pemerintah, menerima, dan melaksanakan begitu saja setiap keputusan pemerintah.

Bentuk partisipasi politik juga dibedakan menjadi empat kategori menurut Milbrath dan Goel (dalam Sudijono Sastroatmodjo, 1995:74-75) sebagai berikut:

Kategori pertama adalah apatis, yaitu orang yang menarik diri dari proses politik. Kedua adalah spektator, kategori kedua ini berupa orang-orang yang setidak-tidaknya pernah ikut dalam pemilihan umum. Ketiga gladiator, yaitu orang-orang yang secara aktif terlibat dalam proses politik, yakni sebagai komunikator dengan tugas khusus mengadakan kontak tatap muka, aktivis partai dan pekerja kampanye, serta aktivis masyarakat. Keempat pengkritik, yaitu orang-orang yang berpartisipasi dalam bentuk yang tidak konvensional.

Ruslan (dalam Handoyo, 2000:212) menemukan bentuk partisipasi politik yang tidak hanya terbatas pada pemberian suara pada saat pemilihan umum, akan tetapi partisipasi politik lebih luas dan beragam bentuknya. Bentuk dari partisipasi politik lainnya antara lain adalah sebagai berikut.

- a. Sensitif terhadap persoalan politik dan sosial dengan cara mengikuti perkembangan politik melalui berbagai kegiatan seperti seminar, symposium, kongres, melihat berita di TV dan diskusi kelompok
- b. Ikut dalam kegiatan kampanye politik, misalnya kegiatan kampanye calon eksekutif atau legislatif.
- c. Menggelar aksi demonstrasi guna mempengaruhi keputusan kebijakan pemerintah.
- d. Berkontribusi secara nyata dalam berbagai kegiatan, seperti mendirikan komunitas peduli lingkungan.
- e. Bergabung dengan suatu partai politik

Suryadi (2007:134) memberikan pendapatnya tentang pemberian suara dalam pemilihan umum:

Pemberian suara (*voting*) merupakan bentuk partisipasi politik aktif yang paling luas tersebar. Dewasa ini pemberian suara terdapat di hampir semua sistem politik politik, baik yang demokratik maupun otoriter. Namun pemilihan umum dalam negara-negara otoriter dan berpartai tunggal lebih merupakan alat bagi penguasa daripada alat untuk memilih siapa yang seharusnya menjalankan kekuasaan itu. Pemilihan umum di negara-negara berpartai tunggal tidak dimaksud untuk memberi kesempatan pada rakyat untuk mempengaruhi kebijaksanaan pemerintah, tetapi lebih memberi kesempatan pada kaum elit

yang berkuasa untuk berpropaganda dan memobilisasikan rakyat. Jadi pemberian suara itu merupakan tindakan untuk memperoleh dukungan rakyat terhadap sistem politik dan elit yang berkuasa.

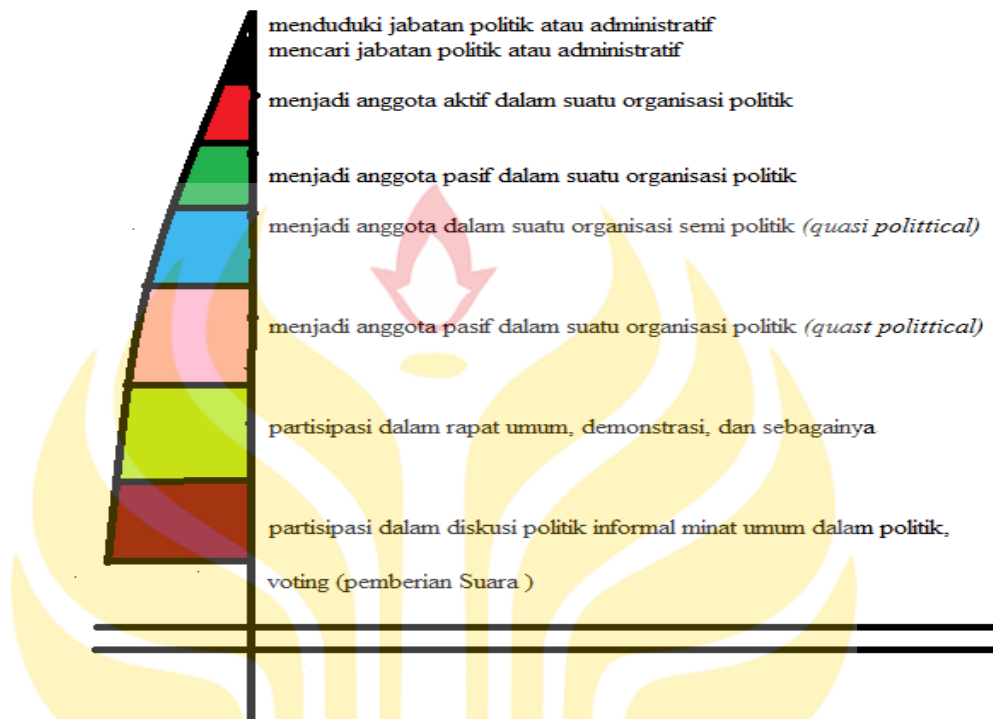
Jadi meskipun pemberian suara merupakan wujud partisipasi politik yang lebih dikenal oleh masyarakat, namun beberapa bentuk partisipasi di atas juga dapat dilakukan oleh masyarakat.

Maran (2007:148), berpendapat bahwa “bentuk partisipasi politik yang paling umum dikenal adalah pemungutan suara (*voting*) entah untuk memilih calon wakil rakyat atau untuk memilih kepala negara”

Huntingon dan Nelson (dalam Handoyo, 2008:212) menyatakan “secara sistematis menyebutkan lima bentuk partisipasi politik berdasarkan riset yang telah mereka lakukan. Kelima bentuk itu adalah: (1) kegiatan pemilihan, (2) *lobbying*, (3) kegiatan organisasi, (4) mencari koneksi (*contacting*), dan (5) tindak kekerasan (*violence*)”.

Cohen dan Uphoff (dalam Basrowi, Sukiden, dan Suko Susilo, 2012:66) “membedakan empat jenis partisipasi, yaitu Pertama, partisipasi dalam pengambilan keputusan. Kedua, partisipasi dalam pelaksanaan. Ketiga, partisipasi dalam pengambilan pemanfaatan. Keempat, partisipasi dalam evaluasi. Keempat jenis partisipasi itu bila dilakukan bersama-sama atau secara keseluruhan, maka akan memunculkan aktivitas yang terintegrasi secara potensial”.

Kemudian Michael Rush dan Phillip Althoff menyebutkan bentuk partisipasi politik melalui gambar berikut.



Gambar 1. Bentuk Partisipasi Politik Menurut Michael Rush dan Phillip Althoff

Sumber: Michael Rush dan Philip Althoff (1990:124)

Macam partisipasi politik konvensional dan non-konvensional yang terjadi berbagai negara. “Kegiatan politik ‘konvensional’ adalah bentuk partisipasi politik yang ‘normal’ dalam demokrasi modern. Bentuk ‘Non-konvensional’ termasuk beberapa yang mungkin legal (seperti petisi) maupun yang ilegal, kekerasan, dan revolusioner. Bentuk-bentuk dan frekuensi partisipasi politik dapat dipakai sebagai ukuran untuk menilai stabilitas sistem politik, integritas kehidupan politik, dan kepuasan atau ketidakpuasan warganegara” (Mas’oed dan MacAndrews, 2008:57-58).

Konvensional	Nonkonvensional
Pemberian suara	Pengajuan petisi
Diskusi politik	
Membentuk dan bergabung dalam kelompok kepentingan Komunikasi individual dengan pejabat publik dan administratif	Mogok
	Perang gerilya dan revolusi

Sumber: Mas'ood dan MacAndrews (2008:58).

C. Faktor yang Mempengaruhi Partisipasi Politik

Dalam segala hal mengenai fenomena, kejadian atau tindakan di dalam dunia ini pasti bermula dari sebuah istilah ada sebab ada akibat, tak luput pula dalam tindakan partisipasi politik yang mana didalam partisipasi politik terdapat sebuah unsur yang mendorong terjadinya partisipasi politik tersebut, dorongan di sini bukan hanya saja dorongan yang mengarahkan kedalam tingginya tingkat partisipasi politik akan tetapi dorongan di sini juga mengarahkan kedalam rendah atau kecilnya dari partisipasi politik itu sendiri. Dari macam-macam faktor partisipasi politik tersebut akan mengarahkan bagaimana cara yang akan dilakukan masyarakat untuk menggambarkan perilaku dari partisipasi politik itu sendiri.

Era yang modern seperti ini segala informasi dapat dengan cepat disebarluaskan, sehingga hal ini juga dapat mempengaruhi partisipasi politik di dalam masyarakat. Seperti yang dikatakan Handoyo (2000:216) “media massa juga merupakan faktor makro yang cukup besar pengaruhnya terhadap partisipasi politik warga negara. Berdasarkan informasi yang disajikan oleh media massa, individu warga negara dapat mengetahui secara cepat peristiwa atau kejadian politik aktual di lingkungannya, memberikan penilaian terhadap peristiwa tersebut dan mengambil sikap (afeksi) tertentu berkenaan dengan peristiwa politik tersebut”.

Myron Weiner (dalam Mas'ood dan Colin MacAndrews, 2008:56-57) menyebutkan terdapat lima hal yang menyebabkan

terjadinya partisipasi yang lebih luas dalam politik, antara lain sebagai berikut.

1. Modernisasi. Terjadinya perubahan kearah yang lebih baik dalam berbagai bidang seperti pertanian, industri, pendidikan, pesatnya media informasi komunikasi dan perpindahan penduduk dari desa ke kota. Sehingga dari adanya perubahan pada seluruh bidang mengakibatkan persaingan semakin ketat dan masyarakat sadar bahwa mereka dapat menentukan keinginan mereka, sehingga mereka akan lebih menentukan untuk ikut dalam kekuatan politik dalam pemerintahan.
2. Perubahan-perubahan Struktural Kelas Sosial. Dengan terbentuknya kelas sosial baru dan adanya industrialisasi dan modernisasi yang mengakibatkan semakin banyaknya kelas sosial menengah sehingga berdampak pada siapa yang berhak dalam pembuatan keputusan politik dan hal tersebut mengakibatkan perubahan pada pola partisipasi politik.
3. Pengaruh Kaum Intelektual dan Komunikasi Massa Modern. Adanya kaum intelektual yang menciptakan idea tentang egaliterisme dan nasionalisme kepada masyarakat umum dengan tujuan untuk mendorong peningkatan partisipasi masyarakat kedalam pengambilan keputusan politik. Dari adanya penyempurnaan dalam bidang transportasi dan informasi membantu mempercepat idea tersebut tersebar luas

sehingga dengan mudah untuk mendorong masyarakat untuk ikut dalam partisipasi politik.

4. Konflik di antara Kelompok-kelompok Pemimpin Politik. Dari adanya konflik banyak dari kelompok yang berkonflik mencari dukungan rakyat yang mengakibatkan rakyat terbelah karena berbeda dalam hal dukungan, sehingga hal ini akan mendorong masyarakat untuk lebih dalam berpartisipasi karena keinginan mereka untuk memenangkan pemimpin yang mereka dukung.
5. Keterlibatan Pemerintah yang Meluas dalam Urusan Sosial, Ekonomi dan Kebudayaan. Semakin ikut campurnya pemerintah kedalam kehidupan rakyat, maka rakyat semakin dikontrol dalam berbagai kegiatan yang mana bila hal ini tidak adanya kontrol dari masyarakat maka masyarakat dapat sangat dirugikan. Sehingga dari situ masyarakat akan lebih melibatkan diri dalam pengambilan keputusan agar kebijakan yang dikeluarkan pemerintah sesuai dengan keinginan mereka.

Alexander Abe (dalam Hery Kusmanto, 2013:45) menyebutkan beberapa faktor yang mempengaruhi bentuk serta kualitas dari partisipasi politik di dalam masyarakat.

1. Faktor Sosial Ekonomi, dilihat berdasarkan pendapatan ekonomi, kualitas pendidikan, dan jumlah keluarga.
2. Faktor Politik, faktor politik ini terbagi menjadi komunikasi politik dimana sebuah komunikasi yang konotasinya mengenai

politik yang bertujuan mengatur manusia. Kesadaran politik, hal ini berbicara tentang kepekaan masyarakat didalam menghadapi kondisi negara. Pengetahuan masyarakat terhadap Proses Pengambilan Keputusan, hal ini akan mempengaruhi bentuk dari keputusan yang akan dikeluarkan pemerintah. Kontrol Masyarakat terhadap Kebijakan Publik, hal ini dimaksudkan bahwa masyarakat dapat menggiring suatu kebijakan agar tidak menyeleweng dari wewenang yang dimiliki pemerintah melalui kritik dan saran.

3. Faktor Fisik Individu dan Lingkungan, Faktor fisik individu ketersediaan dan penggunaan fasilitas demi keberlangsungan hidup. Faktor lingkungan merupakan satu kesatuan ekosistem yang utuh yang terdiri dari seluruh material yang ada didalamnya.
4. Faktor Nilai Budaya, hal ini berkaitan tentang bagaimana bentuk dari demokrasi kita nantinya dalam menjalankan sebuah sistem politik.

Rosenberg (dalam Maran, 2007:156) menyebutkan tiga alasan atau faktor yang menyebabkan seseorang untuk tidak ingin ikut dalam partisipasi politik yaitu:

Pertama, karena ketakutan akan konsekuensi negatif dari aktivitas politik. Di sini orang beranggapan bahwa aktivitas politik merupakan ancaman terhadap kehidupannya. Kedua, karena orang beranggapan bahwa berpartisipasi dalam kehidupan politik merupakan kesia-siaan. Dia merasa sia-sia, karena partisipasi politiknya tidak akan mempengaruhi proses

politik. Ketiga, karena tidak adanya perangsang untuk berpartisipasi dalam kehidupan politik. Di sini orang, misalnya, tidak menghargai gagasan-gagasan politik. Tak ada hasil yang bisa dipetik dari partisipasi tersebut. Maka orang pun enggan atau tidak mau berpartisipasi dalam aktivitas politik.

Lipset (dalam Mujani, 2007:255) “bahkan mengeklaim bahwa partisipasi politik yang rendah baik untuk demokrasi. Ia memberi kontribusi untuk stabilitas demokrasi. Beberapa penulis pada tahun 1950 an dan 1960 an membuat klaim yang serupa, bahwa partisipasi politik yang rendah kepuasan masyarakat terhadap kinerja demokrasi”.

Faktor lain yang mempengaruhi partisipasi politik dikemukakan oleh Setiadi dan Kolip (dalam Nurchotimah,2015:40) adalah faktor sosio-ekonomi dan politik, faktor ini berkaitan dengan keadaan sosio-ekonomi dan politik di tempat individu berada. Individu yang memiliki status ekonomi yang rendah tidak memiliki waktu untuk ikut dalam partisipasi politik hal ini berbeda dengan mereka yang memiliki status ekonomi yang tinggi. Bukan hanya ekonomi yang mempengaruhi partisipasi politik tetapi juga status sosial masyarakat, sehingga lingkungan yang selama ini mereka tempati akan selalu mempengaruhi mereka dalam partisipasi politik.

Lindenfield (dalam Maran, 2007:156) berpendapat “bahwa faktor utama yang mendorong seseorang untuk berpartisipasi dalam kehidupan politik adalah kepuasan finansial. Dalam studinya, Lindenfield menemukan bahwa status ekonomi yang rendah menyebabkan seseorang merasa teralienasi dari kehidupan politik, dan

yang bersangkutanpun akan menjadi apatis. Hal ini tidak terjadi pada orang yang memiliki kemampuan ekonomi”.

Selanjutnya Milbarath (dalam Maran, 2007:156-157) berpendapat bahwa terdapat empat faktor utama yang mendorong seseorang untuk ikut aktif dalam proses partisipasi politik. Pertama, adanya rangsangan, dimana hal ini dapat ditemukan pada kegiatan yang bersifat komunikasi dalam membahas suatu persoalan. Kedua, faktor karakteristik pribadi seseorang, dimana dalam ini menyangkut sisi dalam dari seseorang disebutkan bahwa seseorang yang berjiwa sosial tinggi akan sangat peka terhadap isu-isu yang berada disekitarnya bisa saja mengenai isu politik, kesehatan, ekonomi, pembangunan dll. Ketiga, faktor karakter sosial seseorang, hal ini berkaitan dengan ekonomi, ras, kelompok etis dan agama dimana didalam semua hal tersebut terdapat nilai yang baik, bila nilai yang baik tersebut melekat pada diri seseorang maka seseorang akan senantiasa berusaha untuk menyebarkannya kepada lingkungan sosialnya melalui berpartisipasi politik. Keempat, faktor situasi atau lingkungan politik itu sendiri, situasi yang aman tidak ada paksaan atau ancaman dengan menjunjung nilai demokrasi akan mendorong seseorang untuk ikut dalam partisipasi politik karena mereka tidak takut untuk menyuarkan keinginan mereka.

Surbakti (2010:185) berpendapat bahwa “seseorang yang memiliki status sosial dan ekonomi yang tinggi diperkirakan tidak

hanya memiliki pengetahuan politik, tetapi juga memiliki minat dan perhatian pada politik, serta sikap dan kepercayaan pada pemerintah”.

Huntington dan Nelson (1994:62-63) dalam studinya berpendapat:

Pembangunan sosioekonomi biasanya bertambah dengan cara yang agak mantap dalam perjalanan waktu. Akan tetapi di banyak masyarakat, tingkat partisipasi dalam pungutan suara atau bentuk-bentuk partisipasi politik lainnya menunjukkan fluktuasi yang cukup besar dalam periode yang cukup pendek. Mungkin saja terjadi perluasan partisipasi yang mendadak dan kemerosotan yang sama mencoloknya dalam partisipasi. “Di banyak negara yang masih dianggap relatif terbelakang”, demikian Burnner dan Brewer, “sudah ada tingkat partisipasi yang sangat tinggi dalam pemungutan suara, dan nampaknya tidak mempunyai perkembangan sekuler yang jelas menuju kepada peningkatan jumlah orang memberikan suara itu”. Di Turki dan Kolombia dalam tahun-tahun sesudah Perang Dunia II, ada periode-periode di masa partisipasi dalam pemungutan suara menurun dengan tajam. Angka-angka itu dapat berarti bahwa jumlah orang yang memberikan suara tidak mencerminkan tingkat partisipasi secara keseluruhan. Mungkin saja sebuah negara yang belum berkembang mempunyai tingkat partisipasi yang tinggi pemungutan suara, akan tetapi tingkat yang rendah dalam bentuk partisipasi lainnya.

Huntington dan Nelson (1994:160) yang berpendapat bahwa seseorang yang memiliki kesibukan masing-masing biasanya akan lebih fokus terhadap kesibukan yang selama ini mereka jalani, ketimbang ikut dalam urusan partisipasi politik yang selama ini tidak relevan dengan urusan yang mereka jalani selama ini dan mungkin tidak ada gunanya.

Nursal (dalam Daud, 2015:91) “juga menawarkan faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku pemilih yang didasarkan pada

penyederhanaan aliran-aliran sebelumnya yang meliputi: image sosial/pengelompokan sosial, identifikasi partai, calon (*emotional feelings dan candidate personality*), isu dan kebijakan politik, peristiwa tertentu (peristiwa mutakhir dan peristiwa personal) dan *epistemic issues.*”

Liddle, Mujani dan Ambardi (dalam Yustiningrum dan Ichwanuddin, 121:2015) berpendapat “bahwa faktor-faktor psikologis, terutama kepemimpinan dan identifikasi partai, memiliki pengaruh yang signifikan dibanding faktor-faktor sosiologis, baik agama, suku bangsa, maupun kelas”.

Saiful Mujani, R. William Liddle, dan Kuskridho Ambardi (dalam Yustiningrum dan Ichwanuddin, 119:2015) menyebutkan “faktor kelas sosial, yang meliputi pendidikan, pekerjaan, tingkat pendapatan; agama dan tingkat relijiusitas; ras, etnik, atau sentimen kedaerahan; domisili, yaitu antara perdesaan dan perkotaan; jenis kelamin; dan usia sebagai faktor-faktor sosiologis yang dianggap mempengaruhi pilihan pemilih dalam pemilu”.

Saiful Mujani, R. William Liddle, dan Kuskridho Ambardi (dalam Yustiningrum dan Ichwanuddin, 122-133:2015) pilihan rasional dilihat berdasarkan “identitas partai (*partisanship*), predisposisi atas kebijakan-kebijakan pemerintah beserta persepsi tentang kondisi saat ini, evaluasi atas kinerja partai atau pejabat yang berkuasa, persepsi tentang citra personalitas calon, hingga prospek

calon atau partai jika terpilih (berkuasa). Jadi, pilihan untuk berpartisipasi atau memilih partai atau kandidat tertentu merupakan kompleksitas dari berbagai faktor dalam ketiga model tersebut”.

D. Sosialisasi Politik

Sosialisasi adalah sebuah proses pengenalan terhadap anak mengenai hal baru yang perlu mereka ketahui mulai dari hal mendasar hingga seperti norma hingga politik. Seperti pengertian “Sosialisasi politik adalah bagian dari proses sosialisasi yang khusus membentuk nilai-nilai politik, yang menunjukkan bagaimana seharusnya masing-masing anggota masyarakat berpartisipasi dalam sistem politiknya. Kebanyakan akan-anak, sejak masa kanak-kanaknya, belajar memahami sikap-sikap dan harapan-harapan politik yang hidup dalam masyarakat” (Mas’oed dan MacAndrews, 2008: 42).

Sementara itu pengertian sosialisasi politik menurut Fred I. Greenstein (dalam Fonataba, 2016:6) adalah:

Sosialisasi politik adalah penanaman informasi politik yang disengaja, nilai-nilai dan praktik-praktik politik oleh badan-badan instruksional secara formal ditugaskan untuk tanggung jawab dalam hal ini, semua usahanya mempelajari politik, baik formal maupun informal, disengaja ataupun tidak disengaja, pada setiap tahap siklus kehidupan, dan termasuk didalamnya tidak hanya eksplisit masalah belajar politik saja, akan tetapi juga secara nominal belajar sikap non politik mengenai karakteristik-karakteristik kepribadian yang bersangkutan.

Hasan (2006:19) menyebutkan “dalam berbagai kepustakaan kita telah banyak membaca bahwa sosialisasi politik merupakan proses yang mempengaruhi baik anak maupun orang dewasa secara politik

tanpa sengaja dan tanpa refleksi harus hidup menyesuaikan diri terhadap norma-norma dan ketentuan dari struktur-struktur politik yang ada di masyarakat”.

Rush dan Philip Althoff (dalam Handoyo, 2008:171) mengatakan bahwa “sosialisasi politik adalah cara-cara belajar seseorang terhadap pola-pola sosial yang berkaitan dengan posisi-posisi kemasyarakatan seperti yang diketengahkan melalui bermacam-macam badan masyarakat”.

Mas’oed dan MacAndrews (2008:42-43) mengungkapkan terdapat dua hal penting yang harus diperhatikan dalam proses sosialisasi politik. Pertama, bahwa sosialisasi itu berjalan seumur hidup. Jadi sikap yang dibentuk orang tua terhadap anaknya ketika masih kecil dapat berubah menjadi semakin kuat sesuai arah sosialisasi dari orang tua atau bahkan berkembang ketika anak tersebut tubuh dan berbaur dengan lingkungan lainnya seperti lingkungan kerja atau lembaga pendidikan. Adanya perang juga dapat menjadi berubahnya pandangan politik dalam masyarakat akan tetapi peristiwa semacam ini lebih berpengaruh terhadap golongan berusia muda dikarenakan sifat politik mereka yang masih fleksibel. Kedua, sosialisasi politik berwujud transmisi dan pengajaran langsung dan tidak langsung. Pengajaran langsung berupa tindakan politik secara eksplisit seperti adanya pelajaran kewarganegaraan. Sedangkan pengajaran tak langsung dimana hal ini berjalan dimasa kanak-kanak apakah anak itu

akan menjadi anak penurut atau pembangkang dimana hal tersebut dapat mempengaruhi sikap mereka ketika dewasa.

E. Agen Sosialisasi Politik

Sosialisasi politik tidak terjadi dan terbentuk begitu saja melainkan ada beberapa lembaga ataupun agen-agen dalam kehidupan masyarakat yang ikut dalam membentuk, mempengaruhi dan mendorong hingga terjadinya sosialisasi politik tersebut. Agen-agen tersebut adalah keluarga, lingkungan kerja, lingkungan pendidikan (sekolah), media masa, teman bermain, dan kontak politik langsung.

Dari seluruh agen atau lembaga sosialisasi politik yang disebutkan di atas, bahwa agen sosialisasi yang paling berpengaruh adalah keluarga, kelompok pertemanan, dan sekolah dimana hal tersebut akan dijelaskan di bawah ini (Handoyo, 2008:173-177).

1. Keluarga, pengaruh kehidupan keluarga baik yang langsung maupun tak langsung merupakan agen sosialisasi pertama yang dialami seseorang. Keluarga memiliki pengaruh besar terhadap anggota-anggotanya. Pengaruh yang paling jelas adalah dalam pembentukan sikap terhadap wewenang kekuasaan. Bagi anak yang dibuat bersifat anti keengganan untuk mematuhi dapat mendatangkan hukuman. Pengalaman berpartisipasi dalam pembuatan keputusan keluarga dapat meningkatkan perasaan kompetensi politik si anak, memberikannya kecakapan-kecakapan untuk melakukan interaksi politik dan membuatnya

lebih mungkin berpartisipasi secara aktif dalam sistem politik sesudah dewasa. Keluarga juga memberikan sikap-sikap politik masa depan, menempatkan individu dalam lingkungan masyarakat, membentuk ikatan-ikatan etnik, linguistik, religius, kelas sosial, memperkuat nilai-nilai dan prestasi cultural serta mengarahkan aspirasi aspirasi pekerjaan dan ekonominya.

2. Sekolah, sekolah yang merupakan sebuah monopoli dalam memberikan pengetahuan dan keahlian yang dimiliki dan dikembangkan masyarakat, memberikan peluang yang sangat besar kepada sekolah untuk memainkan peranannya sebagai lembaga tempat nilai-nilai dan masyarakat disemaikan dan diwariskan. Sekolah memainkan peran sebagai agen sosialisasi politik melalui kurikulum pengajaran beraneka ragam kegiatan ritual dan kegiatan-kegiatan guru. Instrumen formal untuk menyampaikan pesan-pesan pendidikan kepada anak didik, sekolah melalui kurikulumnya memiliki kemampuan potensial untuk berperan sebagai instrumen sosialisasi politik. Melalui kurikulum ini pula, sekolah dapat memberikan pandangan-pandangan yang kongkrit tentang lembaga-lembaga politik dan hubungan-hubungan politik. Ia juga dapat memegang peran penting dalam pembentukan sikap aturan permainan politik yang tak tertulis. Seperti yang terjadi sekolah-sekolah negeri di Inggris. Sekolah pun dapat mempertebal kesetiaan terhadap

sistem politik dan memberikan simbol-simbol umum untuk menunjukkan tanggapan yang ekspresif terhadap sistem tersebut. Melalui kurikulum pendidikan kewarganegaraan misalnya, anak didik dilatih dan dibina menjadi negara yang baik dan menjadi partisipan aktif dalam kehidupan politik.

Demikian pula, melalui indoktrinasi politik, anak didik diarahkan untuk mempelajari dan menguasai ideologi politik tertentu yang dirancang untuk merasionalisasi dan membenarkan suatu rezim. Kendati tidak selalu berhasil, kurikulum sekolah memainkan sebagai sarana kunci bagi siswa memperoleh pengetahuan tentang kehidupan politik dan membangun loyalitas terhadap negara. Peranan tersebut menjadi lebih penting lagi bersamaan dengan semakin meningkatnya proporsi penduduk suatu negara yang mengisi usia formatifnya di sekolah. Peranan sekolah dalam mewariskan nilai-nilai politik tidak hanya terjadi melalui kurikulum sekolah. Sosialisasi juga dilakukan sekolah melalui berbagai upacara yang diselenggarakan di kelas maupun di luar kelas dan berbagai kegiatan extra yang diselenggarakan oleh Organisasi Siswa Intra Sekolah (OSIS).

3. Peranan kelompok pertemanan sebagai agen sosialisasi semakin penting dan meluas. Pada masyarakat modern (industry), anak-anak mulai berpaling dari garis keturunan dan

otoritas mereka kepada orientasi-orientasi baru bagi perilaku sosial dan politik mereka. Acuan perilaku mereka dapat ditemukan kelompok pertemanan atau pergaulan. Kelompok pertemanan mengambil peran penting dalam proses sosialisasi politik selama masa remaja dan berlangsung terus sepanjang usia dewasa. Talcott Parson menyatakan bahwa kelompok pertemanan tumbuh menjadi agen sosialisasi politik yang sangat penting pada masa orang tua dan berada di sekolah menengah atas. Selama periode ini orang tua dan guru-guru sekolah sebagai figure otoritas pemberi (transmitter) proses belajar sosial kehilangan pengaruhnya. Sebaliknya, peranan kelompok-kelompok klik, gang-gang remaja, dan kelompok-kelompok remaja yang lain menjadi semakin penting. Pengaruh sosialisasi yang penting dari kelompok pertemanan bersumber di dalam faktor-faktor yang membuat peranan keluarga menjadi sangat penting dalam sosialisasi politik, yaitu: (1) akses yang sangat ekstensif dari kelompok-kelompok pertemanan terhadap anggota-anggota mereka, dan (2) hubungan-hubungan pribadi yang secara emosional berkembang didalamnya.

4. Pekerjaan dibentuk berdasarkan formal maupun non formal yang dibentuk dibentuk berdasarkan lingkungan pekerjaan, seperti serikat buruh sosial dan yang sejenisnya merupakan

seluruh komunikasi informasi dan keyakinan yang jelas. Individu-individu biasanya mengidentifikasi diri dengan suatu kelompok tertentu seperti serikat buruh dan menggunakan kelompok-kelompok tersebut sebagai acuan (reference) dalam kehidupan politik. Mereka cenderung sensitive terhadap norma-norma kelompok dan menilai tindakan-tindakannya berdasarkan perhitungan (kalkulasi) apa yang paling baik bagi kelompok tersebut. Berpartisipasi dalam suatu tawar-menawar kolektif atau berdemonstrasi merupakan pengalaman sosialisasi berkesan bagi buruh maupun majikan. Buruh yang berdemonstrasi dapat mengetahui bahwa ia dapat mempengaruhi bentuk keputusan yang akan mempengaruhi masa depannya yang sedang dibuat dan ia memperoleh juga pengetahuan tentang kecakapan-kecakapan bertindak tertentu seperti berdemonstrasi dan mogok yang bisa digunakan kalau ia berpartisipasi lagi dalam bentuk-bentuk kegiatan politik lain.

5. Media massa, media massa masyarakat modern tak dapat hidup dengan baik tanpa komunikasi yang luas, cepat dan beragam. Sebagian besar masyarakat dunia, telah menjadi satu kelompok penonton tunggal yang tergerak hatinya oleh peristiwa-peristiwa yang sama dan dirangsang oleh selera yang sama. Media massa seperti: surat kabar, radio, majalah, televisi dan internet memegang peran penting dalam menularkan sikap-

sikap dan nilai-nilai modern kepada bangsa-bangsa baru merdeka. Selain memberikan informasi tentang-informasi politik, media massa juga menyampaikan nilai-nilai utama yang dianut oleh masyarakatnya.

6. Kontak-kontak politik langsung, tidak peduli betapa positifnya pandangan terhadap sistem politik telah ditanamkan oleh keluarga atau sekolah, tetapi bila seseorang diabaikan oleh partainya, ditipu oleh polisi, kelaparan tanpa ditolong, mengalami ketidakadilan atau teraniaya didalam militer, maka pandangan terhadap dunia politik sangat mungkin berubah. Partai politik, kampanye pemilihan umum, perang krisis politik negeri dan daya badan-badan pemerintahan terhadap tuntutan-tuntutan individu dan kelompok-kelompok dapat mempengaruhi kesetiaan mereka untuk mematuhi hukum dan sistem politik secara luas.

Agen sosialisasi politik yang pertama dan utama adalah keluarga, dalam keluarga TNI sosialisasi politik ini mungkin hanya berjalan sebagian saja karena terdapat orang tua mereka yang berstatus sebagai TNI aktif yang netral dalam urusan politik. Tetapi sosialisasi politik ini dapat berjalan seutuhnya bila status orang tua mereka sebagai TNI aktif sudah berubah menjadi TNI purnawirawan.

F. Pemilihan Umum Presiden

Pemilihan umum disebut juga dengan '*political market*' artinya pemilihan umum adalah pasar politik dimana di situ terdapat jual beli antara peserta pemilu dengan masyarakat yang telah memiliki hak suara dimana sebelumnya peserta pemilu menawarkan produk yang dimiliki melalui kampanye dengan berbagai media dan masyarakat membelinya dengan menggunakan hak pilihnya kepada peserta pemilu ataupun partai politik (Fonataba, 2016:5).

Budiardjo (2013:461) menyebutkan "dikebanyakan negara demokrasi, pemilihan umum dianggap lambang, sekaligus tolok ukur, dari demokrasi itu. Hasil pemilihan umum yang diselenggarakan dalam suasana keterbukaan dengan kebebasan berpendapat dan kebebasan berserikat, dianggap mencerminkan dengan agak akurat partisipasi serta aspirasi masyarakat".

Pemilihan umum atau sering di sebut Pemilu merupakan sarana kedaulatan rakyat sebagai salah satu implementasi dari negara yang demokratis. Marijan (2010:83) menjelaskan "secara sederhana, sistem pemilu berarti instrumen untuk menerjemahkan perolehan suara didalam pemilu ke dalam kursi-kursi yang dimenangkan oleh partai atau calon. Adapun variable-variabel dasar yang sering dipakai mencakup formula pemilihan (*electoral formula*), struktur penyuaran (*ballot structure*), dan besaran distrik (*district magnitude*)".

Pemilihan Presiden atau Pilpres adalah sebuah implementasi dari salah satu pilar demokratis yaitu adanya pemilihan umum yang

bertujuan untuk terjadinya regenerasi kepemimpinan yang berguna agar tidak terjadinya kesewenang-wenangan didalam menggunakan kewenangannya. Dalam pemilihan presiden warga yang boleh ikut dalam pelaksanaannya adalah warga yang telah melakukan administratif setempat dan memiliki hak pilih secara sah berdasarkan undang-undang pemilihan umum.

Salah satu bagian yang bisa kita ambil dalam ruang partisipasi yaitu pemilihan umum. Pemilu adalah sarana politik yang diciptakan sebagai ruang untuk warga negara dalam berpartisipasi untuk memilih pemimpin. Pemilu dalam konteks Negara Indonesia dilaksanakan lima tahun sekali baik pemilihan lembaga legislatif maupun eksekutif termasuk pemilihan presiden (Fonataba, 2016:3).

Pemilihan umum merupakan sebuah sistem yang dibuat oleh negara yang aturannya dimuat ke dalam sebuah peraturan perundang-undangan dimana Asshiddiqie (2006:10) mengungkapkan sebagai berikut:

Sesuai dengan prinsip kedaulatan rakyat yang dianut dalam UUD 1945, maka kekuasaan untuk menentukan corak dan cara pemerintahan sesungguhnya berada di tangan rakyat. Kedaulatan tersebut dilaksanakan menurut ketentuan UUD, yaitu oleh lembaga negara, dan oleh rakyat yang diantaranya melalui mekanisme pemilihan umum sebagaimana diatur dalam Pasal 22E UUD 1945. Pemilihan umum juga dapat dilihat sebagai mekanisme yang menghubungkan antara infrastruktur politik dan superstruktur politik. Pemilu juga merupakan mekanisme transformasi aspirasi politik partai menjadi kebijakan negara.

Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 (dalam Undang-undang No.7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum).

G. TNI

Samuel P. Huntington (dalam Sunarto, 2016:77) “membedakan tipe militer menjadi 2 (dua) macam, yaitu *militer profesional* dan *tentara praetorian*”. Disamping dua tipe militer yang disebutkan oleh Samuel P Huntington, masih terdapat satu lagi tipe militer menurut Amos perlmutter (dalam Sunarto, 2016:77) yaitu tipe tentara professional revolusioner.

Pertama, profesionalisme militer adalah tentara yang memiliki tanggung jawab yang besar untuk pengabdianya yang ditunjukkan hanya negara, dari adanya hal tersebut maka muncullah *military mind* yang menimbulkan adanya pandangan terhadap supremasi sipil. Kedua, tentara praetorian adalah tentara yang mana terlibat dalam dua aktivitas sekaligus yaitu aktivitas di dalam pemerintahan dan juga dalam pertahanan. Ketiga, professional revolusioner adalah tentara yang lahir karena adanya keinginan untuk melawan dan lepas dari penjajah, dimana masyarakat berlatih kemiliteran guna

memperjuangkan kebebasan mereka hal ini dapat dikatakan sebagai sebuah revolusi dalam masyarakat (Sunarto, 2016:77-78).

Indonesia pada masa lalu yaitu pada masa Pemerintahan Soeharto TNI merupakan kekuatan yang besar dalam sosial politik di Indonesia dengan doktrin Dwifungsi ABRI yang didukung dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1988, akan tetapi setelah runtuhnya Pemerintahan Soeharto TNI mengalami perubahan yang cukup besar dalam bidang politik. Regulasi TNI saat ini diatur dalam UU No 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia yang disebutkan dalam pasal 39 bahwa TNI dilarang ikut dalam politik praktis di Indonesia. Sehingga dengan adanya No 34 Tahun 2004 kedudukan TNI sangat berbeda jauh ketika masa Orde Baru yang mana di masa kini TNI benar-benar netral dalam urusan politik.

H. Penelitian Relevan

Penelitian ini didukung oleh beberapa penelitian yang relevan. Penelitian yang memiliki objek yang sama adalah penelitian yang dilakukan oleh Rizki Amorowayan A yang berjudul “Partisipasi politik Masyarakat Tionghoa di Desa Tluwah Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Pilkada) Tahun 2017” menyimpulkan bentuk partisipasi politik, yaitu kegiatan diskusi politik informal dan pemberian suara. Faktor-faktor yang memengaruhi partisipasi politik masyarakat Tionghoa pada pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah tahun 2017 terdiri dari kesadaran

politik, kepercayaan pada pemerintah sebelumnya, pendidikan yang tinggi dan status sosial ekonomi.

Penelitian lainnya adalah yang dilakukan oleh Aulia Shilichah Iman Nurhotimah yang berjudul “Partisipasi Politik Pemilih Pemula Di Desa Karang Sari Kecamatan Kebasen Kabupaten Banyumas Pada Pemilihan Presiden 2014” menyimpulkan bentuk-bentuk partisipasi politik pemilih pemula di Desa Karang Sari dapat ditemukan pada saat sebelum pemilihan, pelaksanaan pemilihan dan setelah pemilihan Presiden 2014. Adapun bentuk-bentuk partisipasi pemilih pemula yang dimaksud adalah pemberian suara, kegiatan kampanye, diskusi politik, memahami berbagai persoalan politik dan sosial dengan cara mengikuti berita-berita politik baik internal maupun eksternal melalui media massa, menaati pemerintah, menerima, dan melaksanakan keputusan pemerintah, mengajukan kritik dan perbaikan untuk meluruskan kebijakan. Kemudian Faktor penghambat partisipasi politik pemilih pemula di Desa Karang Sari pada Pemilihan Presiden 2014 adalah berdomisili di luar Desa Karang Sari, kesibukan pekerjaan, kesibukan sebagai pelajar, kepercayaan kepada pemerintah rendah, kurangnya pendidikan politik, tidak mendapat uang untuk memilih, kesibukan mengurus rumah tangga, perasaan tidak mampu, kurangnya sosialisasi politik, kelemahan dalam penyusunan DPT, sedangkan faktor pendorong partisipasi politik pemilih pemula pada pemilihan Presiden 2014 adalah penerimaan terhadap perangsang politik,

karakteristik pribadi, karakteristik sosial dan lingkungan politik yang kondusif.

Persamaan penelitian yang akan saya lakukan dengan penelitian yang telah oleh Rizki Amorowayan A dan Aulia Sholichah Iman Nurchotimah adalah pada objek penelitian yaitu pada bidang partisipasi politik. Kemudian untuk perbedaan terletak pada subjek yang akan diteliti, penelitian yang dilakukan oleh Rizki Amorowayan A memiliki subjek Etnis Tionghoa di Kab Pati dan Aulia Sholichah Iman Nurchotimah memiliki subjek Pemilih Pemula Di Desa Karang Sari kemudian untuk penelitian yang akan saya lakukan memiliki subjek Anak TNI di Asrama Ex Brigif 5.

I. Kerangka Berfikir

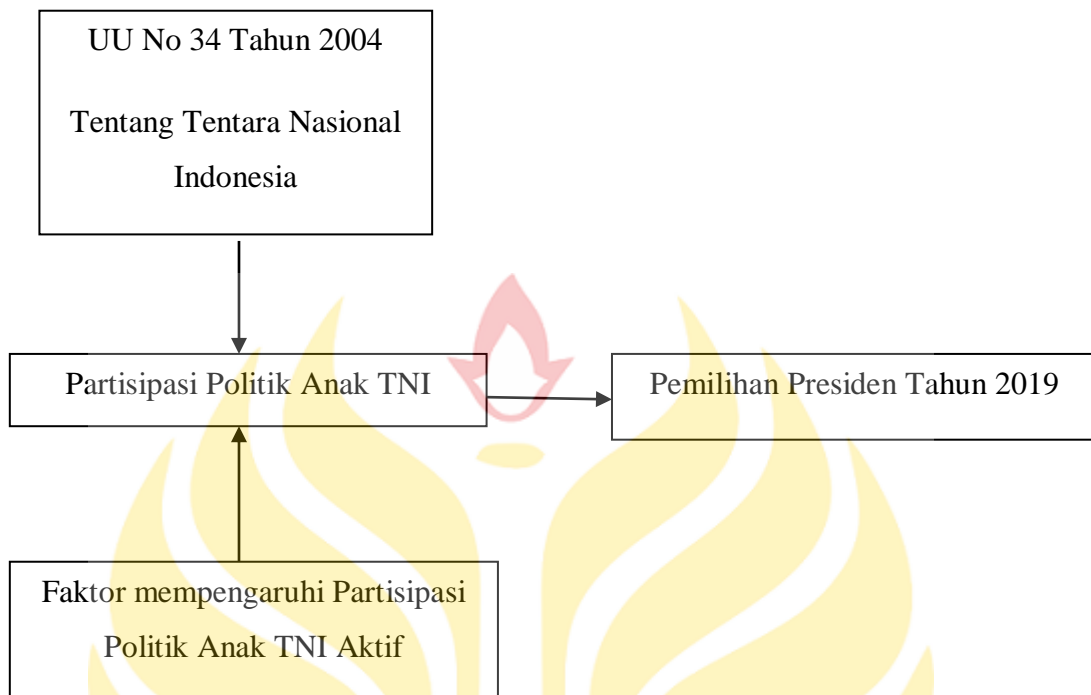
Rachman (dalam Tecia, 2014:18-19) menyatakan “kerangka berpikir merupakan kumpulan konsep-konsep relevan yang terintegrasi dalam satu sistem penjelasan yang berfungsi sebagai hipotesis kerja. Kerangka berpikir digunakan sejak penyusunan metode, pelaksanaan di lapangan dan pembahasan hasil penelitian. Kerangka berpikir di sajikan dalam bentuk uraian dan dapat di perjelas dengan bagan”.

Partisipasi politik merupakan hal yang sangat penting dalam suatu negara. Karena merupakan salah satu bentuk untuk mengembangkan potensi dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Partisipasi politik dapat diartikan sebagai keikutsertaan seseorang dalam berbagai kegiatan politik seperti menggunakan hak pilih,

melakukan lobbying dengan pihak pemerintah, ikut dalam anggota partai dan sebagainya yang mana tujuan dari itu semua adalah untuk mempengaruhi kebijakan pemerintah.

Pemilihan Presiden tahun 2019 dilaksanakan pada 17 April 2019 yang mana diikuti oleh berbagai kalangan yang ada di Kota Semarang salah satunya adalah kalangan dari para anak TNI. Yang menjadi menarik dari tiap diadakannya pemilihan umum adalah adanya partisipasi politik dari anak TNI dalam menggunakan hak pilihnya. Sehingga dalam kasus ini lah penting mengetahui proses sosialisasi dan partisipasi politik yang terjadi dalam diri seorang anak dari TNI yang dimana orang tua (TNI) mereka yang telah berkomitmen untuk tidak menggunakan hak pilihnya demi tujuan mampu berdiri disegala golongan dan menjaga keutuhan internal dari TNI di Indonesia.

Maka dari adanya fenomena tersebut perlu pentingnya untuk mengetahui bagaimana dan apa saja yang mempengaruhi proses partisipasi politik dari anak TNI tersebut dan agen-agen mana saja yang sangat berperan dalam membentuk jiwa partisipasi politik dari anak TNI yang hidup lingkungan masyarakat yang mana terdapat golongan yang memang tidak menggunakan hak pilihnya demi keseimbangan politik di Indonesia.

Bagan 1. Kerangka Berfikir

BAB V

PENUTUP

a. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan hasil pembahasan sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut.

1. Bentuk partisipasi politik Anak TNI pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden tahun 2019 terjadi dalam beberapa bentuk-bentuk partisipasi politik, yaitu seperti menggunakan hak pilih, diskusi politik, dan ikut sosialisasi yang dilaksanakan oleh KPPS. Dari beberapa bentuk partisipasi politik yang dilakukan oleh anak TNI di Asrama Ex Brigif 5, diskusi politik informal yang dilakukan anak TNI menjadi bentuk partisipasi politik yang unik karena diskusi politik yang mereka lakukan hanya sebatas pada teman saja dan bukan dilakukan bersama orang tua mereka karena status orang tua mereka sebagai TNI yang harus menjaga netralitas mereka terhadap segala urusan politik.
2. Faktor pendorong partisipasi politik anak TNI di Asrama Ex Brigif 5 dalam pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden tahun 2019 adalah sebagai berikut: 1) adanya rangsangan, 2) karakteristik pribadi seseorang, 3) sosial ekonomi, 4) kesadaran politik, 5) informasi dari media massa dan 6) latar belakang calon kandidat. Faktor penghambat partisipasi politik anak TNI dalam pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden tahun 2019 adalah sebagai berikut: 1) kesibukan

sebagai pelajar, 2) kesibukan dalam bekerja, dan 3) anggapan partisipasi politik merupakan kesia-siaan.

b. Saran

1. Parpol, Ormas, dan Media massa dapat meningkatkan partisipasi politik anak TNI dengan diadakannya kegiatan sosialisasi politik, sehingga anak TNI akan lebih tahu akan hak, kewajiban, dan tanggung jawab sebagai masyarakat yang memiliki peran besar dalam memilih pemimpin baik di masa depan.
2. KPUD Kota Semarang untuk lebih aktif dan kreatif dalam mengadakan sosialisasi politik atau diskusi politik untuk kalangan remaja pada setiap Kelurahan.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Basrowi, Sukidin dan Suko Susiolo. (2012). *Sosiologi Politik..* Bogor: Ghalia Indonesia
- Budiardjo, Miriam. (2013). *Dasar-Dasar Ilmu Politik.* Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama
- Handoyo, Eko. (2008). *Sosiologi Politik.* Semarang: UNNES Press
- Huntington, Samuel P dan Joan Nelson. (1994). *Partisipasi Politik Di Negara Berkembang.* Sahat Simamor, penerjemah : Jakarta PT Rineka Cipta
- Hasan, Ibnu. (2006). *Sistem Politik, Idiologi, Dan Demokrasi Di Indonesia.* Jatinangor :Pusat Kajian Pemerintahan STPDN
- Maliki, Zainuddin. (2018). *Sosiologi Politik: Makna Kekuasaan Dan Transformasi Politik.* Yogyakarta: Gadjah Mada University Press
- Maran, Rafael Raga. (2001). *Pengantar Sosiologi Politik.* Jakarta: PT Rineka Cipta
- Marijan, Kacung. (2010). *Sistem Politik Indonesia: Konsolidasi Demokrasi Pasca Orde Baru.* Jakarta: Prenada Media Group
- Mas'ood, Mohtar dan Colin MacAndrews. (2008). *Perbandingan Sistem Politik.* Yogyakarta: Gadjah Mada University Press
- Moleong, Lexy J. (2010). *Metodelogi Penelitian Kualitatif.* Bandung: PT. Remaja Rosdakarya
- Rush, Michael dan Phillip Althoff. (1990). *Pengantar Sosiologi Politik.* Jakarta: CV, Rajawali
- Samego, Indria. (2000). *TNI Di Era Perubahan.* Jakarta: Erlangga
- Sastroatmodjo, Sudijono. (1995). *Perilaku Politik.* Semarang: IKIP Semarang Press
- Suginon. 2010, *Metode Penelitian Pendidikan Kuantitatif Kualitatif dan R&D;* Penerbit. CV Alfabeta, Bandung
- Sunarto. (2016). *Sistem Politik Indonesia.* Yogyakarta: Magnum Pustaka Utama
- Surbakti, Ramlan. (1992). *Memahami Ilmu Politik.* Jakarta: Gramedia Widya Sarana

BUKU ONLINE

Mujani, Saiful. (2007). *Muslim Demokrat: Budaya Demokrasi dan Partisipasi Politik Di Indonesia Pasca Orde Baru*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama. https://books.google.co.id/books?hl=en&lr=&id=mMKxsD7xAHgC&oi=fnd&pg=PA5&dq=partisipasi+politik&ots=mVLnWrX7nt&sig=1uhvs3 CFhVMqghVTAYnJLUg&redir_esc=y#v=onepage&q=partisipasi%20politik&f=false

Supeno. Hadi. (2010). *Kriminalisasi Akan Tawaran Gagasan Radikal Peradilan Anak Tanpa Pidana*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama https://books.google.co.id/books?hl=en&lr=&id=oZNdDwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PP1&dq=pengertian+anak+menurut+uu&ots=aydA6PF46Y&sig=s16qK6RkcpKTFcqKXb1mUy3Ugq0&redir_esc=y#v=onepage&q=definisi%20anak&f=false

Suryadi, Budi. (2007). *Sosiologi Politik: Sejarah, Definisi, dan Perkembangan Konsep*. Jogjakarta: IRCiSoD <http://eprints.unlam.ac.id/2160/1/SOSIOLOGI%20POLITIK%20Sejarah%2C%20Definisi%20dan%20Perkembangan%20Konsep.pdf>

JURNAL

Daud. M. (2015). Prediktor Perilaku Pemilih Dalam Pemilu : Prespektif Psikologi Politik. *Talenta*, September 2015. 87-96. Vol 1. No 1. <http://ojs.unm.ac.id/talenta/article/view/5235>

Firdaus, Dede Wahyu. (2018). Kebijakan Dwi Fungsi ABRI Dalam Perluasan Peran Militer Di Bidang Sosial-Politik Tahun 1966-1998. *Jurnal UPI Bandung*. 1-13. http://jurnal.upi.edu/file/KEBIJAKAN_DWIFUNGSI_ABRI_DALAM_PERLUASAN_PERAN_MILITER_DI_BIDANG_SOSIAL.pdf

Fonataba, Feri F. (2016). Partisipasi Masyarakat Papua Dalam Pemilihan Presiden Dan Wakil Presiden Republik Indonesia Tahun 2014 (suatu studi di kota Jayapura Selatan Provinsi Papua). *Jurnal Politico*. 1-16. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/politico/article/view/13373>

Jimly Asshiddiq. (2016). Partai Politik Dan Pemilihan Umum Sebagai Instrumen Demokrasi. *Jurnal Konstitusi*. 6-29. Vol 3, No 4. Jakarta: Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/public/content/infoumum/ejurnal/pdf/ejurnal_Jurnal%20Konstitusi%20KANJURUHAN%20Vol%202%20no%201.pdf

Kusmanto, Hery. (2013). Peran Badan Permusyawaratan Daerah Dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat. *Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik UMA* . 39-47. Vol 1, No 1. <http://ojs.uma.ac.id/index.php/jppuma/article/viewFile/550/384>

Yustiningrum, RR Emilia dan Wawan Ichwanuddin. (2015). Partisipasi Politik Dan Perilaku Pemilih Pada Pemilu 2014. *Jurnal Penelitian Politik*. 117–135. Vol 12, No 1. <http://ejournal.politik.lipi.go.id/index.php/jpp/article/download/533/341>

SKRIPSI

Amorowayan, Riski A. 2017. Partisipasi Politik Masyarakat Etnis Tionghoa Pada Pemilihan Kepala Daerah Di Kabupaten Pati Tahun 2017 (Studi kasus di Tluwah, Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati). *Skripsi*. Falkutas Ilmu Sosial. UNNES: Semarang

Nurchotimah. Aulia Sholichah Iman. 2015. Partisipasi Politik Pemilih Pemula Di Desa Karang Sari Kecamatan Kebasen Kabupaten Banyumas Pada Pemilihan Presiden 2014. *Skripsi*. Falkutas Ilmu Sosial. UNNES: Semarang

Tecia, Regina Singes. 2014. Partisipasi Politik Masyarakat Keturunan Tionghoa Terhadap Pilkada Di Kabupaten Slawi. *Skripsi*. Falkutas Ilmu Sosial. UNNES: Semarang

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-undang 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia

Undang-undang No.7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum

Webside

<http://dunkdaknyonk.blogspot.com/2011/03/pengertian-anak-menurut-beberapa-uu.html> diakses pada 8 Mei 2019 Pukul 20.00 WIB